

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Halaman 201.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Abdul Aziz Hakim. Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah: di Era Demokrasi Langsung. Cetakan Pertama. Toga Press. Yogyakarta. 2006.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cet.ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta, PT. Rhineka Cipta, 2004).
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

- Koirudin. 2005. *Stetsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia “Format Masa Depan otonomi Daerah Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Krishmna Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2000.
- Koesoemahatmadja, *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Lexy, J. M. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Persada Karya.
- Lexy, J. M. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Persada Karya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014).
- Mas’ud Said, M. (2005). *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : UMM Press
- Marzuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya : Yuridika, 1993).
- Quade, E.S. 1984. *Analysics For Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publisher.
- Sarwono, J. dan Arikunto, M. S. 2006. *Metode Penelitian. Kuantitatif Kualitatif*. Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Cipta Dunia.
- Sogiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Subarsono, A. 2015. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia* (Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2014). Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Istimewa Khusus*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).
- Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Wahab, Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijkansanaan Negara*.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Jakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service.

B. JURNAL

- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (!). Berakhti, Shintarani. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembanagn Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis*. JOM FISISP. 2(1).

- Suhartoyo. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law & Governance Journal. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro*.
- Sa'adah, Nabitus. dkk. (2019). PELAKSANAAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*.
- Setyadi, Bambang. 2007. *Pebentukan Peraturan Daerah*. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. 5(2).
 Sucahyo, Imam. 2017. Partisipasi *Stakeholders* Islam dalam Upaya Mereformasi Peraturan Daerah tentang Usaha Tempat Hiburan di Kota Probolinggo. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2(2), 130-145.
- Sulhan, Muhammad dan Totok Sasongko. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar Dalam Masyarakat (Strudi Kasus Di Kelurahan Kauman Malang)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 6 (1).
- Tamara. 2008. *Analisis Strategi Pengembangan Obyek Wisata Situs Jolotundo Sebagai Obyek Wisata di Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya Kabupaten Mojokerto*. Universitas Negeri Surabaya. 5(5).
- Tinambunan. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Melalui Penguatan Budaya Maritim dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean*. Flat Justisia journal of Law. 10(1).
- Ughwuanyi. 2013. *The Obstacles To Effective Policy Implementation By The Polic Bureaucracy In Developing Nations: The case Of Nigeria*. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review. 2(7).
- Yuliani, Febri, dan Masril, Winda. Yuliani. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Taman Rekreasi Alam Mayang Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(1).
- Yusuf, M., dan Anwar, K. 2011. Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4(1), 1-14.

Zainuddin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011),
Halaman 107

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262).

Peraturan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

Perda Demak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan.

Peraturan Bupati 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Demak Nomor 1 tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten demak

D. WEBSITE

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, Diakses pada Tanggal 27 Febuari 2020

<https://sugithewae.wordpress.com/2012/11/13/pengertian-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>, Diakses pada tanggal 27 Febuari 2020

<https://www.materibelajar.id/2016/05/tujuan-dan-fungsi-pengawasan-menurut.html>, Diakses pada 27 Febuari 2020

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, Diakses pada tanggal 27 Febuari 2020

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. (Jimly Asshiddiqie, “*Penegakan Hukum*”), Diakses Tanggal 7 Maret 2020.

<https://jateng.tribunnews.com/2019/09/18/bambang-suronggono-ingin-wujudkan-semarang-menjadi-kota-koperasi-dan-umkm-di-2020?page=2>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2020

<https://mnews.co.id/read/fokus/strategi-pemkot-semarang-untuk-mengembangkan-umkm/>, Diakses pada tanggal 10 juni 2020

<https://jateng.tribunnews.com/2019/09/05/puluhan-pemandu-karaoke-terjaring-razia-di-demak-langsung-dibawa-ke-panti-rehabilitasi-surakarta> di unduh pada 15 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB

<https://www.suaramerdeka.com/regional/semarang/230448-belasan-tempat-karaoke-di-demak-dibongkar> di unduh pada 15 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4775686/polemik-karaoke-di-demak-satpol-pp-segel-di-36-tempat-dirusak/1> di unduh pada 15 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2019/07/03/18195241/pemilik-dan-pemandu-lagu-hadang-petugas-saat-tutup-tempat-karaoke-di-demak> di-unduh pada 15 Desember 2019 Pukul 15.00 WIB

<http://www.rmoljateng.com/read/2018/09/03/10917/Perda-Hiburan-Disahkan,-Puluhan-Tempat-Karaoke-Di-Demak-Terancam-Ditutup-> di unduh pada 15 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB

<http://bpptpmdemak.com/pub/> di unduh pada 15 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB

<https://jdih.demakkab.go.id/prokum/perda-no-16-tahun-2018.pdf> di unduh pada 15 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB

<https://jateng.tribunnews.com/2019/11/14/bupati-demak-dinilai-tidak-tegas-menegakan-perda-tempat-hiburan-karaoke> di unduh pada Desember 2019 Pukul 15.00 WIB.